



Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

The Role of Family Hope Program (PKH) Companions in Overcoming Poverty of Beneficiary Families (KPM) in Taman District, Pemalang Regency

Phina Karina^{1*}, Amin Yusuf²

^{1,2} Pendidikan Non Formal, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: phinakarina@students.unnes.ac.id

Article History:

Received: Februari 12, 2025;

Revised: Februari 27, 2025;

Accepted: Maret 14, 2025;

Published: Maret 31, 2025;

Keywords: Family Hope Program, PKH Companion, Poverty, Social Welfare

Abstract: *The Family Hope Program (PKH) is a social assistance program of the Ministry of Social Affairs which aims to improve the welfare of the poor through cash assistance and social assistance. This program is used to improve access to education, health, and social welfare, therefore assistance is provided for school children, toddlers, pregnant women, the elderly, and people with disabilities. This study uses a descriptive qualitative method with a natural approach. The study was conducted in Taman District, Pemalang Regency with research subjects including PKH Coordinators, PKH Companions, and PKH KPM members. Data collection in this study was conducted by interviews, observations and documentation. The results of the study show that PKH companions play an important role as facilitators, educators, representatives and technicians in supporting Beneficiary Families (KPM). The facilitative role includes motivation and support for KPM in fulfilling their obligations. As a companion educator, he is able to socialize PKH policies well and provide skills training to KPM. In the role of the companion representative, he always voices the needs of the KPM to the relevant parties, while in the technical role, the companion is able to handle the administration of assistance, data updates and monthly reporting of the companion well. The supporting factors in the success of the assistance are from the government and stakeholders. However, the obstacles faced by the facilitators are the low participation of KPM in carrying out P2K2 activities and the dishonesty of some KPM who should not be eligible to receive assistance.*

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program bantuan sosial Kementerian Sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan tunai dan pendampingan sosial. Program ini digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, maka dari itu bantuan diberikan untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan alamiah. Studi dilakukan di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan subjek penelitian meliputi Koordinator PKH, Pendamping PKH, dan anggota KPM PKH. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH berperan penting sebagai fasilitator, edukator, perwakilan dan teknisi dalam mendukung Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peran fasilitatif mencakup motivasi dan dukungan bagi KPM dalam memenuhi kewajiban mereka. Sebagai edukator pendamping mampu melakukan sosialisasi kebijakan PKH dengan baik serta memberikan pelatihan keterampilan kepada KPM. Dalam peran perwakilan pendamping selalu menyuarakan kebutuhan KPM kepada pihak yang terkait, sementara dalam peran teknisi pendamping mampu menangani administrasi bantuan, pemutakhiran data dan pelaporan bulanan pendamping dengan baik. Faktor pendukung dalam keberhasilan pendampingan adalah dari pemerintah dan stakeholder. Namun, hambatan yang dihadapi pendamping adalah rendahnya partisipasi KPM dalam melakukan kegiatan P2K2 dan ketidakjujuran beberapa KPM yang seharusnya tidak layak menerima bantuan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang ada dinegara Indonesia yang secara kompleks dan multidimensional sehingga akan berpengaruh kepada pembangunan negara (Sultan et al., 2023). Kemiskinan sendiri adalah keterbatasan dalam kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keberlangsungan hidupnya. Permasalahan tentang kemiskinan akan berdampak pada lingkungan ekonomi dan akan menimbulkan masalah sosial yang akan berpengaruh kepada instabilitas politik. Kemiskinan merupakan probelama yang sudah terjadi dari dahulu kala, seperti yang terjadi dimasa lalu bahwa masyarakat miskin pada umumnya bukan karena perihap pa dikarenakan bukan kurang pangan namun miskin dalam bentuk minimnya dalam pemenuhan kebutuhan material (Prawoto & Selatan, 2009). Kemiskinan merupakan masalah klasik yang serius dan sering kali muncul di masyarakat. Di Indonesia, kemiskinan menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius dalam penanganannya. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin (Sari et al., 2024).

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang, 2017-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	351.183	208,34	16,04
2018	372.115	200,67	15,41
2019	389.209	209,03	16,02
2020	401.857	215,08	16,56
2022	429.549	195,84	15,06
2023	467.204	195,57	15,03

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistic Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Pada tabel tersebut memaparkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 penduduk miskin Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dari 16,56 sampai 15,03 persen. Melihat penurunan angka kemiskinan maka perlunya perhatian dari pemerintah untuk permasalahan kemiskinan tersebut. Maka dari itu dengan adanya permasalahan kemiskinan solusi yang dapat diberikan adalah pembangunan sosial. Pembangunan sosial memiliki dua aspek yang saling berkaitan yaitu pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk bisa mendapatkan pekerjaan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan dirinya dan lingkungan, serta pengembangan hubungan antara masyarakat dan institusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk yang berkaitan dengan

pembangunan ekonomi (Haliim et al., 2024). Kesejahteraan adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh semua orang dengan memiliki kehidupan yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional dan sosial, serta memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Marantek et al., 2023) . Di Indonesia pembangunan sosial dijalankan melalui kebijakan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2018, memaparkan bahwa dana bantuan sosial merupakan pemberian dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara tentatif dan selektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program yang dibentuk Kementerian Sosial dalam mengupayakan untuk memberikan suatu pelayanan kesejahteraan kepada keluarga penerima manfaat (Nadilla et al., 2022). PKH merupakan model perlindungan sosial yang memiliki sasaran berbasis keluarga. Konseptual dari PKH ini adalah bantuann sosial yang mencakup program jaminan sosial dengan bentuk tunjangan uang tunai, barang, ataupun berupa pelayanan kesejahteraan. Program bantuan ini akan diberikan kepada keluarga yang miskin dan sudah ditetapkan sebagai penerima oleh Kementerian Sosial. Bantuan sosial ini tentunya memiliki tujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh akses layanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, pangan, ataupun pendampingan. Bantuan ini akan diarahkan untuk menjadi sumber penghasilan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. PKH akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Adibowo et al., 2023).

Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah memaparkan bahwa persentase penerima PKH di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sejumlah 90,76%, tahun 2021 sejumlah 91,94%, tahun 2022 sejumlah 96,62% dan pada tahun 2023 sejumlah 93,57%. PKH di Kecamatan Kabupaten Pemalang, mempunyai tujuan dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang membutuhkan, sekaligus mendorong keluarga tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga yang tidak mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bukan hanya itu, bantuan ini juga akan mendorong keluarga untuk mengembangkan modal manusia yang berkualitas. Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengentasan kemiskinan dengan efektivitas dari peran pendamping sosial (Zuria, A., & Putra, R., 2021).

Pada pelaksanaan program tersebut terdapat peran yang membantu masyarakat dalam penerimaa bantuan PKH yaitu peran pendamping. Pendamping mempunyai kedudukan yang akan menjembatani masyarakat dan pemerintah untuk berbagai kepentingan dari pemerintah dan masyarakat. Pendamping harus aktif dalam memberikan dukungan kepada masyarakat atau KPM. Pendamping harus membangkitkan kesadaran masyarakat, memberikan motivasi, menyampaikan informasi, mengadakan pelatihan untuk masyarakat (Azizah & Prathama, 2024). Dalam peningkatan program tersebut maka terdapat beberapa komponen peran pendamping untuk pelaksanaan PKH. Peran menurut Jim Ife and Frank Tesoriero (2016) dalam(Azizah & Prathama, 2024), yang dapat dilakukan oleh pendamping sosial yaitu (1) Peran *Facilitative roles* (peran fasilitatif), (2) *Educational roles* (peran edukasional), (3) *Representational roles* (peran perwakilan), 4) *Technical Roles* (peran teknis).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan bahwa pendamping harus berperan sesuai dengan perannya sehingga program bantuan sosial terlaksana sesuai dengan tepat untuk menurunkan angka kemiskinan dan bisa mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan membahas peran pendamping PKH, faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan suatu situasi ketidakmampuan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan (Lestari et al., 2017). Maka dari itu pemerintah membuat program bantuan sosial untuk masyarakat miskin salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan (PKH) adalah program yang dibuat untuk perlindungan sosial di Indonesia dengan bentuk bantuan sosial (Sulfadli et al., 2023). Bantuan sosial PKH ditekankan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) terdapat persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Program ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Pelaksanaan program tersebut juga terdapat pendampingan yang bertugas menyambungkan kepentingan lembaga pemerintah kepada KPM. Pendamping sangat penting dalam berjalannya PKH guna menjadi fasilitas (Nadilla et al., 2022). Bantuan tersebut akan berbentuk pemberian sejumlah uang tunai, masyarakat akan mendapatkan bantuan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Bantuan PKH ini memiliki aspek dalam pemberian bantuan yaitu aspek kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita umur 0-6 tahun. Aspek pendidikan untuk anak sekolah dasar, sekolah menengah

pertama dan sekolah tingkat menengah keatas. Aspek kesejahteraan sosial untuk para lansia yang berumur 70 tahun keatas, serta masyarakat penyandang disabilitas (Saragi et al., 2021).

Peran menurut Gobson Invancevich dan Donnelly (2002) dikutip dari penelitian oleh Desty Stephany Solahudin (Solahudin et al., 2022) adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban dalam dua sistem yang berbeda namun tetap terhubung. Pendamping adalah seseorang yang memiliki peran dalam memfasilitasi untuk memberikan suatu dorongan kepada masyarakat. Pendamping sebagai fasilitator sosial akan membantu masyarakat yang harus didampinginya untuk memenuhi kewajiban dalam program kegiatan sosial yang telah diikuti. Pada pelaksanaannya pendamping diperlukan karena beberapa masyarakat yang miskin tidak ada kekuatan untuk bersuara. Masyarakat yang mengalami kemiskinan sangat membutuhkan orang yang dapat diandalkan dalam membantu menyuarkan hak mereka (Nandini et al., 2022). Pendamping dalam pelaksanaan program akan sangat membantu dalam memberikan dukungan untuk keberhasilan berjalannya program. Pendamping tersebut merupakan warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, dan Kementerian Sosial dengan jangka waktu kontrak tertentu (Nandini et al., 2022). Proses pendampingan memiliki beberapa indikator antara lain (Farah, 2022):

- a. Memiliki pemahaman maupun suatu metode keilmuan yang diperoleh dari pelatihan maupun pendidikan pendamping sosial sebagai dasar dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan sehingga mendapatkan perubahan sosial yang berkelanjutan.
- b. Transformasi atau perubahan untuk masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera.

Jim Ife dan Frank Tesoriero berpendapat bahwa peran pendamping adalah untuk mengembangkan kapasitas perilaku dari masyarakat untuk mengorganisir dan menentukan upaya-upaya sendiri dalam memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi. Terdapat empat peran pendamping menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) yaitu:

- a. *Facilitative roles* (peran fasilitatif)
- b. *Educational roles* (peran edukasional)
- c. *Representational roles* (peran perwakilan)
- d. *Technical Roles* (peran teknis)

2. METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, metode yang digunakan untuk obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan triangulasi, analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif atau kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan menjadi instrumen kunci (Sugiyono, 2022). Penelitian kualitatif menurut Creswell merupakan jenis penelitian yang memahami dan mengeksplorasi makna dari sebuah individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial (Ishtiaq, M., 2019). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pemalang yang meliputi Ruang PKH Kabupaten Pemalang di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, Ruang PKH Kecamatan Taman yang berada di Kecamatan Taman. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan pada Desember 2024 – Januari 2025. Subjek dalam penelitian ini terdapat 1 Koordinator PKH Kabupaten Pemalang, 3 orang pendamping PKH Kecamatan Taman, dan 4 orang KPM PKH Kecamatan Taman. Penelitian ini akan menggunakan alat ukur triangulasi. Triangulasi menurut (Sugiyono, 2022) adalah pengujian kredibilitas dari informasi yang telah didapat selama penelitian dengan pengecekan informasi dan melakukan perbandingan antara sumber, cara, dan waktu dalam mengurangi bias dari informasi yang telah didapat. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan teknik digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah dari sugiyono yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Conclusion Drawin / Kesimpulan (*Verification*). (Sugiyono, 2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Peran pendamping dalam pelaksanaan program memiliki kedudukan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini pendamping bertugas untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra dari masyarakat serta mitra dari pemerintah sehingga harus bisa menjembatani beberapa macam kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Pada pelaksanaannya pendamping diperlukan karena beberapa masyarakat yang miskin tidak ada kekuatan untuk bersuara. Masyarakat yang mengalami kemiskinan sangat membutuhkan orang yang dapat diandalkan dalam membantu menyuarakan hak mereka (Nandini et al., 2022). Pendamping memiliki tujuan untuk membantu anggota KPM untuk

melatih kemandirian KPM sehingga ketika mengalami kesulitan di kemudian hari bisa mengatasi kesulitan tersebut dengan baik. Pemberdayaan menurut peijono dan pranarka dalam (Purwanti, 2022) memiliki dua arti yaitu *to give power or authority* dan *to give ability or enable*. Makna yang pertama adalah pemberian kekuasaan otoritas untuk pihak yang tidak memiliki atau berdaya dan makna yang kedua adalah untuk memberikan suatu kemampuan dan peluang kepada pihak yang belum mampu dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu dengan peran pendamping dalam program PKH diharapkan masyarakat dapat mampu melakukan hal terkait dengan bantuan sendiri di waktu yang mendatang.

Pendamping memiliki beberapa peran startegis dalam pelaksanaan pendampingan untuk mengatasi kemiskinan KPM. Pendamping memastikan bahwa KPM telah memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan fasilitas dalam aspek pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan kehidupan KPM. Pendamping juga memperhatikan bahwa KPM sudah memenuhi kewajiban yang telah ada dari ketentuan dan persyaratan, hal tersebut untuk mewujudkan perubahan dari perilaku KPM yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pendamping pada saat pelaksanaan proses pendampingan memiliki pengaruh yang sangat penting karena secara teknis adanya pendamping yang secara langsung bersangkutan dengan KPM sehingga sangat berperan untuk keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Tahapan pendampingan dalam pelaksanaan secara peraturan adalah pelaksanaan keseluruhan tahapan pelaksanaan PKH yaitu pertemuan awal, proses validasi calon KPM, pembaharuan data, verifikasi komitmen, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengawalan penyaluran bantuan, melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), penanganan pengaduan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program PKH, serta membuat laporan untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial.

Pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) pendamping akan menggunakan metode presentasi dan melalui media pembelajaran lain. Pertemuan tersebut akan dijadikan sebagai penyampaian informasi, edukasi maupun permasalahan terkait dengan bantuan sosial PKH. Sosialisasi P2K2 atau pertemuan kelompok akan memberikan materi yang telah disampaikan dari KEMENSOS ketika diklat, materi yang diberikan berupa modul yang bertemakan menjadi orang tua yang lebih baik, tentang mengurus lansia dan disabilitas, pencegahan dan penanganan stunting, menjaga kesehatan didalam keluarga, pengolahan makanan yang bergizi dan pengelolaan keuangan sehingga KPM bisa mengelola bantuan sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya itu pada pertemuan tersebut juga pendamping melakukan penyampaian informasi mengenai bantuan sosial serta pemecahan masalah ketika terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan

hal tersebut maka peneliti menggabungkan dengan teori pemberdayaan Jim Ife yaitu pendamping memiliki peran dalam menjalankan tugasnya yaitu Peran fasilitator, perwakilan, edukasional dan teknis. Pada pelaksanaan program di Kecamatan Taman pendamping memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin yaitu:

a. Peran Fasilitator

Pendamping PKH sebagai peran fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian dukungan dan motivasi untuk KPM. Pendamping memiliki peran sebagai fasilitator untuk penyaluran bantuan sosial kepada KPM, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa KPM telah mengerti peraturan yang berlaku dalam program PKH (Utami & Nugroho, 2023). Pendamping menjadi penghubung antar KPM dan berbagai layanan sosial, dengan memastikan bahwa KPM dapat mengakses bantuan sesuai dengan haknya. Dalam hal ini kegiatan pendampingan dilakukan setiap bulannya dengan membantu keluarga untuk memahami dan memenuhi kewajiban program dengan memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah, serta ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan. Pendamping juga memastikan bahwa KPM telah mendapatkan rekening untuk penyaluran bantuan, melakukan monitoring dan pemantauan penyaluran disetiap penyaluran bantuan. Pada saat P2K2 pendamping akan memastikan bahwa KPM aktif mengikuti pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut pendamping akan memberikan motivasi untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pendidikan anak-anak. Pendamping juga memberikan informasi untuk mengubah pola pikir KPM untuk tidak ketergantungan dengan bantuan sosial.

b. Peran Edukasional

Peran edukasional dalam pemberian pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk individu maupun kelompok masyarakat yang didampingi oleh pendamping (Sompie, 2022). Proses pendampingan di Kecamatan Taman dimulai dengan pertemuan awal, pada tahap ini KPM akan diberikan sosialisasi mengenai tujuan PKH, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPM. Setelah pertemuan awal pendamping akan membagi KPM menjadi beberapa kelompok didalam satu desa, kemudian dikumpulkan oleh pendamping untuk dilaksanakan P2K2 atau pertemuan kelompok untuk memberikan edukasi tentang PKH, kebijakan-kebijakan PKH, pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari dan materi tentang dengan memberikan materi pola asuh anak, kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Edukasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan

kemampuan dalam mengelola kehidupan masyarakat untuk lebih mandiri. Melalui pendekatan edukatif pendamping tidak hanya memberikan bantuan sementara namun mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM agar lebih produktif.

c. Peran Perwakilan

Peran pendamping sebagai perwakilan adalah melakukan interaksi dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan masyarakat dan memberikan manfaat untuk masyarakat (Sompie, 2022). Pendamping akan menyatakan kebutuhan dan aspirasi KPM dengan lembaga terkait, sehingga mereka akan menjembatani komunikasi dari KPM dan pihak luar. Pendamping akan memastikan bahwa KPM dapat mengakses hak-hak mereka, serta memperjuangkan kesejahteraan KPM. Ketika terdapat aspirasi maupun keluhan dan pengaduan dari KPM maka pendamping akan mengasesmen permasalahan tersebut dengan didata aspirasi masyarakat seperti ketika terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan PKH berupa alat bantu disabilitas maka akan diasesmen setelah itu pendamping akan mengirimkan kepimpinan kabupaten dan kemudian ke KEMENSOS.

d. Peran Teknis

Peran teknis akan menyangkut dengan urusan pendamping mengenai teknis pendampingan dalam mengumpulkan dan menganalisis data (Purwanti, 2022). Pendamping akan ditugaskan untuk mendampingi KPM yang berkaitan dengan administrasi atau layanan lainnya yang berkaitan dengan bantuan sosial PKH. Ketika terjadi kehilangan ATM maka pendamping akan terus mendampingi KPM untuk mengurus bersama, sehingga ketika KPM tidak mengetahui prosedur dan syarat dalam mengurus ATM yang hilang maka pendamping akan mengarahkan KPM sampai ATM tersebut jadi. Dalam hal ini pendamping akan melakukan pendampingan, namun tidak menjadi perwakilan karena hal tersebut harus KPM yang bersangkutan. Pendamping akan memberikan dukungan teknis kepada KPM ketika terdapat program baru maupun kebijakan baru, pendamping menjelaskan lewat P2K2 kepada KPM. Pendamping akan melakukan pemutakhiran data yang dilakukan setiap perubahan kondisi KPM. Pendamping melakukan pemutakhiran data dengan verifikasi, penyaluran dan pemberhentian PKH. Pada saat pencairan bantuan pendamping akan memastikan bahwa KPM sudah atau belum mendapatkan bantuannya, pendamping akan meminta bukti pembelian maupun pembayaran barang untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah mendapatkan laporan tersebut pendamping akan membuat laporan penyaluran KPM sudah cair maupun belum cair

bantuan tersebut, ketika ada KPM yang belum mendapatkan bantuan atau belum cair maka pendamping akan menanyakan alasan KPM kemudian pendamping akan memasukan laporan penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pendamping.



Gambar 1. Kegiatan P2K2

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pada pelaksanaan pendampingan PKH di Kecamatan Taman terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pendampingan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah dukungan dari KEMENSOS dan Dinas sosial Kabupaten Pemalang melalui pemberian fasilitas dengan BIMTAK bimbingan dan pemantapan dengan dibekali proses pelaksanaan PKH, ruang lingkup kerja pendamping, tupoksi yang harus dikerjakan oleh pendamping. Pendamping akan melakukan diklat sebelum terjun secara langsung di masyarakat, pada saat diklat pendamping akan dibekali materi FDS untuk diberikan pada saat P2K2. Bukan hanya itu saja dari stakeholder juga memberikan dukungan seperti bekerjasama dengan kantor pos, bank BNI untuk proses penyaluran bantuan. Bukan hanya itu pihak kelurahan desa juga memberikan dukungan kerjasama yang baik. KPM juga memberikan kepercayaan kepada pendamping dengan menceritakan permasalahan yang dihadapi KPM kepada pendamping, hal ini karena KPM percaya bahwa pendamping mampu memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi KPM.

Pada proses pelaksanaan pendampingan juga terdapat faktor penghambat seperti KPM yang tidak jujur seperti ketika ada KPM yang sudah sejahtera dan bisa di graduasi dari PKH namun KPM tersebut tidak mengakui hal tersebut terlebih KPM itu merupakan saudara pejabat pemerintah desa, hal tersebut cukup menghambat peran pendamping. Pendamping memiliki tugas untuk menggraduasi 12 KPM dalam setahun, sehingga

pendamping harus memberikan motivasi dan dukungan kepada KPM untuk mandiri tidak bergantung kepada bantuan ini serta memberikan informasi mengenai mengatur bantuan dengan semestinya, sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera. Pada saat P2K2 juga terdapat KPM yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut dikarenakan KPM sudah pindah dan alamat tidak berdomisili di lingkungan tersebut serta tidak melaporkan ke pendamping.

4. KESIMPULAN

Peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Taman sangat strategis dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pendamping berperan sebagai fasilitator, edukator, perwakilan dan teknis dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengakses beberapa pelayanan dan memenuhi kewajibannya. Pada pelaksanaan pendampingan terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini yaitu pendamping mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten untuk mendapatkan bimbingan dan pemantapan sebelum terjun langsung di masyarakat. Dukungan juga datang dari stakeholder seperti pihak kantor pos maupun pihak bank. Disisi lain, hambatan yang dihadapi oleh pendamping adalah ketidakjujuran beberapa KPM yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan, serta rendahnya partisipasi dalam P2K2 karena perpindahan domisili tanpa pemberitahuan kepada PKH. Optimalisasi dan evaluasi juga perlu dalam mekanisme pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa hanya mereka yang membutuhkan yang menerima bantuan. Peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan P2K2 dengan strategi yang lebih inovatif agar lebih efektif dan KPM aktif berpartisipasi. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa yang kuat untuk mengatasi hambatan dalam meng graduasi KPM yang sudah sejahtera sehingga proses verifikasi dan validasi lebih transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya strategi ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif untuk mencapai tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M., Amran, A., & Mulyadi, M. (2022). The review on the role of social companion in the implementation of Family Hope Program (PKH) in Darul Falah District, East Aceh during the COVID-19 pandemic. *Malikussaleh Social and Political Reviews*. <https://doi.org/10.29103/mspr.v3i1.7399>
- Adibowo, R., Dewi, E., Faris, G., Nurdamaia, D., Fahlevi, M., Hartanto, G., & Mukarom, A. (2023). The empowerment effectiveness through the Family of Hope Program (PKH). *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*. <https://doi.org/10.34010/icobest.v4i.422>
- Arnika, M., & B, I. (2023). The role of P2K2 companions for financial management and family business plans in the Family Hope Program in Makassar City. *Journal La Bisecoman*. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v4i6.1054>
- Azizah, P., & Prathama, A. (2024). Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Persentase rumah tangga yang masih tercatat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut kabupaten/kota dan pemanfaatan bantuan PKH (persen), 2020–2022. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/1643/1/persentase-rumah-tangga-yang-masih-tercatat-penerima-program-keluarga-harapan-pkh-menurut-kabupaten-kota-dan-pemanfaatan-bantuan-pkh.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024, Agustus 26). Persentase rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut kabupaten/kota, dan status kepesertaan penerimaan PKH. Diakses pada 21 Februari 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTYzNiMy/persentase-rumah-tangga-penerima-program-keluarga-harapan-pkh-menurut-kabupaten-kota-dan-status-kepesertaan-penerimaan-pkh.html>
- Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, & Abdul Chalel Rahman. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 205–219. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai Burhanuddin. (2013). Hubungan efektivitas pengelolaan Program Raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna*, April, 1–23.
- Dewi, K., & Romayanti, K. (2020). Improving the performance of PKH social assistance assessed by the perspective of social intelligence based on Catur Paramitha and work commitments in Buleleng District. *International Journal of Social Science and Business*. <https://doi.org/10.23887/IJSSB.V4I4.28388>
- Elias, K. H., Tuharea, J., & Soumokil, A. (2023). The government's role in the Family Hope Program (PKH) as an effort to reduce poverty in Kamarian Village, Kairatu District, West Seram Regency. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 2(1), 67–71. <https://doi.org/10.57235/jpa.v2i1.427>

- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Government of Rwanda. (2000). *An approach to the poverty reduction – Action plan for Rwanda*. Kigali, Rwanda, November, 86. <http://www.imf.org/external/NP/prsp/2000/rwa/01/110100.pdf>
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2020). Analisis pengaruh program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53.
- Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Ilmu, S., Dan, S., & Politik, I. (2012). *Program Keluarga Harapan (PKH)*, 17.
- Gupt, A., Kaur, P., Kamraj, P., & Murthy, B. (2016). Out-of-pocket expenditure for hospitalization among below poverty line households in District Solan, Himachal Pradesh, India, 2013. *PLoS ONE*, 11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149824>
- Gustyarini, N. I. D. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, i–78.
- Haliim, W., Ferdiansyah, F., & Sari, A. (2024). Power relations between Program Keluarga Harapan (PKH) facilitators and beneficiary families (KPM) (Study on PKH implementation in Malang Regency). *International Journal of Current Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i2-13>
- Hani, U., & Nadila, D. (2023). Empowerment of the beneficiary family (KPM) of the Hope Family Program (PKH) through the social entrepreneurship program (PROKUS) in Cilebar District, Karawang Regency. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*. <https://doi.org/10.58471/jms.v3i01.1819>
- Hasanul Arifin. (2023). *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Sirandorung* [Skripsi, tidak disebutkan institusinya].
- Ife, J. (2016). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi = Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ifi, M. (2024). The smart way to manage family finances for beneficiary families (KPM) Hope Family Program (PKH). *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.36928/jrt.v7i1.2148>
- Isdayanti, F. F. (2021). *Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/40258/>
- Ishtiaq, M. (2019). Book review: Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>

- Juliani, R., Aneta, Y., & Tui, F. P. D. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Dulupi. *Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3373–3382.
- Kamilah, F., Anwar, S., & Dewi, R. (2023). Pengaruh adanya Program Keluarga Harapan bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(4), 459–478. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i4.24294>
- Khasanah, U. (2023). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengeluaran pendidikan dan konsumsi keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.78-99>
- Lestari, F., Indrianti, D., & Fajarwati, L. (2021). Motivasi berprestasi pendamping sosial Program Keluarga Harapan (Studi kasus pelaksanaan Family Development Session di Kabupaten Gresik). *Jurnal Pendidikan Nonformal*. <https://doi.org/10.17977/UM041V16I2P%P>
- Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto. (2017). Kemiskinan, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 157–171.
- Lestari, W., Kartono, D., Demartoto, A., & Setiyawan, K. (2019). The empowerment of households towards independence through social capital in Program Keluarga Harapan (PKH). *Society*. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.124>
- Literasi, P. (2014). *Review tiga paradigma pembangunan (Strukturalis, Humanis dan Empowering): Sebuah komparatif dan kritik serta saran*. <https://www.pegiatliterasi.com/2014/03/review-tiga-paradigma-pembangunan.html>
- Marantek, H., & Sejati, H. (2023). The effectiveness of the Family Hope Program (PKH) social assistance in increasing the welfare of poor communities. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.476>
- Nadilla, H. F., Nurwati, N., & Santoso, M. B. (2022). Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan anak stunting pada keluarga penerima manfaat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39561>
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya resolusi konflik sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Nasution, F. N., Mariatin, E., & Zahreni, S. (2018). The influence of career development and organizational culture on employee performance. *International Journal of Scientific Research and Management*, 6(01), 57–65. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v6i1.el09>
- Nurazmimar, D. F. (2023). Implementasi perlindungan hukum dalam pemberian pelayanan sosial lansia terlantar berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 35. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45429>

- Nurhasanah, N., Arifuddin, A., & Syaifullah, S. (2023). Peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1), 54–61.
- Ong, Q., Theseira, W., & Ng, I. (2019). Reducing debt improves psychological functioning and changes decision-making in the poor. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116, 7244–7249. <https://doi.org/10.1073/pnas.1810901116>
- Palupi, E., Mawardi, M., & Iriani, A. (2023). Pengembangan e-modul pelatihan berbasis self-directed learning tentang pembuatan materi pembelajaran metode flipped classroom. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2023.v10.i2.p155-165>
- Pintar, C., Keuangan, M., Bagi, K., Penerima, K., Rohmi, M., Mariska, M., Islam, I., Metro, N., Ki, J., Dewantara, H., No.15a, I., Metro, K., Metro, K., & , L. (2023). Cara pintar mengelola keuangan keluarga bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*. <https://doi.org/10.59059/jpmis.v2i4.719>
- Pradina, A. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes* (Tesis). 1–188.
- Prasetya, D., & Safitri, K. (2020). Metode Suggestopedia sebagai alternatif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 6(3). <https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i3.8145>
- Prawoto, N., & Selatan, J. L. (2009). Memahami kemiskinan dan mengatasi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Purwanti, P. (2022). Peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Magelang Selatan. *JSCE: Journal of Society and Continuing Education Number*, 3(2), 383–390.
- Qudus, D., Nurodin, I., & Nugroho, G. (2024). Effectiveness of distribution of social assistance for the Family Hope Program in an effort to maintain accountability of reports (Case study of Social Service of Sukabumi Regency). *Journal of Management, Economic, and Accounting*. <https://doi.org/10.37676/jmea.v3i2.532>
- Rahmat, R. J., Nastia, & Wijaya, A. A. M. (2022). Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membina atlet menuju Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4819–4826.
- Ramdass, R. (2010). Managerial communication – The key to continuous engagement and competitive advantage. *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS*, 08(03), 585–597.
- Reza, F. (2020). *Efektivitas peran pendamping dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)* (Skripsi).
- Ridwan, M., & Islam, G. E. (2011). *Geliat ekonomi Islam*. UIN-Maliki Press.

- Riswanto, A. (2016). Kemiskinan: Faktor penyebab dan analisis pemecahan masalah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(1), 59–72.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rizana, D. (2019). Pengaruh self efficacy, locus of control dan komitmen organisasi terhadap kinerja pendamping sosial. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v18i2.351>
- Roberts, E., Glynn, A., Cornelio, N., Donohue, J., Gellad, W., McWilliams, J., & Sabik, L. (2021). Medicaid coverage 'cliff' increases expenses and decreases care for near-poor Medicare beneficiaries. *Health Affairs*, 40(4), 552–561. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.02272>
- Rohman, F. A. (2023). *Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*. Fakultas Dakwah.
- Rohman, M. S., Faizal, F., & Jauhari, T. (2024). Analisis efektivitas pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- S. Fauzan, R. A. (2019). Peran Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- S., Irmayani, N., H., S., Susantyo, B., Mujiyadi, B., & Nainggolan, T. (2020). Changes of poor family behavior through Family Development Session. *Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200728.006>
- Sandratika, R., Raharjo, S., & Resnawaty, R. (2021). Family development session pendidikan education and training in efforts to increase mentoring capacity for the social assistance of the Hope Family Program in Bandung Regency. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4, 5383–5389. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4I3.2328>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Sari, C. I., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2024). Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sidomulyo Village, Stabat District Langkat Regency. 3(1), 69–80.
- Sartono, & Nugraha, R. D. (2023). Peran pendamping sosial dalam pendidikan multikultural (Studi kasus pada KPM PKH Desa Dukuhkarya). *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–23.

- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi sosial: Individu dan teori-teori psikologi sosial*. PT. Balai Pustaka.
- Sharp, S. (2005). Book review: Disseminating qualitative research in educational settings. *Theory and Research in Education*, 3(2). <https://doi.org/10.1177/147787850500300209>
- Sinaga, R. (2021). Communication patterns of social assistant program for the Harapan Family in the activities of Family Capability Improvement Meetings (P2K2) Beneficiary Family (KPM) Balige District. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS)*. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.33>
- Situmorang, G., & Rahayu, A. (2023). Peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan komponen kesejahteraan disabilitas dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13664>
- Sjafei, M. S. (2020). Merancang kerangka berpikir teoritis (Kasus studi hukum menggunakan teori Roscoe Pound). *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 473–486.
- Solahudin, S., Sagita, I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi peran litbang dalam mewujudkan kegiatan litbang satu pintu di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2(April 2021), 302–308.
- Sommers, B., & Oellerich, D. (2013). The poverty-reducing effect of Medicaid. *Journal of Health Economics*, 32(5), 816–832. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2013.06.005>
- Sompie, M. E. P. (2022). Analisis peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), 93–102. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2210>
- Stampini, M., Medellin, N., & Ibarraran, P. (2023). *Cash transfers, poverty, and inequality in Latin America and the Caribbean*. <https://doi.org/10.18235/0005235>
- Sugiasuti, N., & Ulinuha, R. (2024). Politik kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat: Kasus ketergantungan kebijakan bantuan sosial. *Spirit Publik*, 19(1), 1–15. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/78588/pdf>
- Sugiono. (2012). Metode penelitian kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*, 5(January), 1–5. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA CV.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 75–83. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.198>

- Sumbawati, N. K., Asmini, A., Juliawati, H., & Pamungkas, B. D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ropang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 194–203. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.570>
- Sundayani, Y., & Fadri, Z. (2024). Peran asisten sosial dengan kemandirian masyarakat. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.31958/jsk.v8i1.11070>
- Suyitno. (2021). Penelitian kualitatif: Metode penelitian kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syahmira, S., Noor, A., & S. (2023). Supervisi dalam monitoring tugas pendamping di Family Development Session Program Keluarga Harapan. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.36451/jisip.v19i1.70>
- Utami, A. S., & Nugroho, F. (2023). Social capital of KPM PKH after independent graduation in improving social competence in Kuranji District, Padang City, Indonesia. *Social Capital*, 6(7), 113–123. <https://www.academia.edu/download/112583168/4146663439.pdf>
- Virgoreta, T. D. A., Nur Pratiwi, R., & Suwondo. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurusan Administrasi Publik*, 2(12), 1–6.
- Zuria, A., & Putra, R. (2021). Pengaruh efektivitas petugas pendamping Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Mayang Mangurai. *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)*. <https://doi.org/10.33087/sjee.v5i2.102>